

e~LaKu

e-Book Laporan Keuangan



Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

BPKAD JOMBANG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
BAB II SISTEMATIKA DAN PROSEDUR LAPORAN KEUANGAN.....	3
2.1 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan.....	3
Bab I Pendahuluan.....	5
Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	6
Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD.....	6
Bab IV Penutup.....	8
2.2 Ilustrasi Pos-Pos Laporan Keuangan.....	8
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	9
LPSAL (Khusus BLUD).....	12
Neraca.....	13
Laporan Operasional (LO).....	20
Laporan Arus Kas (khusus BLUD).....	24
Laporan Perubahan Ekuitas.....	24
2.3 Panduan Jurnal dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	26
BAB III PENUTUP.....	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas, praktis, dan sistematis yang diwujudkan ke dalam bentuk digital sehingga memberikan akses yang mudah dan fleksibel. **e-LaKu** (e-Book Laporan Keuangan) disusun dengan tujuan pembelajaran mandiri, mempercepat proses penyusunan laporan, dan mengurangi kesalahan penyajian laporan keuangan bagi SKPD di Kabupaten Jombang.

Dengan panduan ini, kami berharap dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mempermudah para pejabat pengelola keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan terkait dengan kondisi keuangan serta kinerja keuangan perangkat daerah dan mendukung tercapainya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD. Namun demikian, kami menyadari panduan ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran atas isi panduan ini untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga langkah kecil ini, dapat berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Penyusun,

Sub Bidang Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk menjamin bahwa keuangan daerah dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, hemat, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. **Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah.
2. **Pengelolaan pendapatan daerah** dari sumber-sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana transfer, dan lain-lain.
3. **Pengelolaan belanja daerah** untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan.
4. **Pengawasan dan audit** yang dilakukan oleh inspektorat daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. **Pelaporan dan pertanggungjawaban** keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, disebutkan bahwa Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai Entitas akuntansi, meliputi:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, yang terdiri atas 5 elemen utama yaitu pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, SiLPA/SiKPA (sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran);
2. **Neraca**, yang memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas;

3. **Laporan Operasional**, yang terdiri atas 5 elemen utama yaitu pendapatan LO, beban, kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO;
4. **Laporan Perubahan Ekuitas**, yang terdiri atas 4 elemen utama yaitu ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir; dan
5. **Catatan Atas Laporan Keuangan**, yang merupakan penjelasan secara rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan laporan keuangan SKPD didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PROSEDUR LAPORAN KEUANGAN

2.1 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Sistematika penyusunan laporan keuangan SKPD yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap laporan yang disajikan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan, kinerja operasional, serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berlandaskan data yang valid.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Dalam ketentuan umum Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai Entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, yang terdiri atas 5 elemen utama yaitu pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, SiLPA/SiKPA (sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran);
2. **Neraca**, yang memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban dan ekuitas;
3. **Laporan Operasional**, yang terdiri atas 5 elemen utama yaitu pendapatan LO, beban, kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO;
4. **Laporan Perubahan Ekuitas**, yang terdiri atas 4 elemen utama yaitu ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir; dan
5. **Catatan Atas Laporan Keuangan**, yang merupakan penjelasan secara rinci atas elemen- elemen dalam laporan keuangan, baik elemen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan penjelasan di atas penyusunan laporan keuangan, maka berikut adalah susunan laporan keuangan yang harus disajikan atau disusun oleh SKPD:

1. Cover
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Pernyataan Tanggungjawab
5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

- a. LRA

Menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat dilaksanakan. **Dengan rekening:**

- Pendapatan: Jenis-jenis pendapatan yang diterima;
- Belanja: Kategori belanja yang telah dilakukan;
- Surplus/Defisit: Selisih antara pendapatan dan belanja.

- b. Neraca

Menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. **Dengan rekening:**

- Aset: Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Properti Investasi;
- Kewajiban: Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
- Ekuitas: nilai seluruh jumlah aset yang sudah dikurangi kewajiban;

- c. Laporan Operasional

Menyajikan informasi tentang pendapatan dan beban operasional untuk periode yang ditentukan. **Dengan rekening:**

- Pendapatan Operasional: Sumber pendapatan dari aktivitas operasional;
- Beban Operasional: Pengeluaran yang terkait dengan aktivitas operasional;
- Surplus/Defisit Operasional: Selisih antara pendapatan dan beban;

- d. Laporan Perubahan Ekuitas

Menggambarkan perubahan dalam ekuitas selama periode laporan. **Dengan rekening:**

- Saldo Awal Ekuitas: Ekuitas pada awal periode;
- Surplus/Defisit: Pengaruh dari laporan operasional dan transaksi lainnya;
- Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan: Akun antara atau transitoris pada entitas akuntansi yang timbul karena proses transaksi selama periode akuntansi yang melibatkan RKUD untuk kemudian dikonsolidasikan pada kewajiban entitas akuntansi;

- Dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar: Dampak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan akuntansi atau kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos yang terjadi secara berulang dan sistemik; dan
- Saldo Akhir Ekuitas: Ekuitas pada akhir periode.

e. CaLK

Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berisi penjelasan mengenai tujuan penyusunan laporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD.

1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Menjelaskan dasar hukum peraturan dan undang-undang yang mendasari penyusunan laporan keuangan, termasuk referensi kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan terkait lainnya yang relevan antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan; dan
- Peraturan Daerah yang mendukung lainnya.

1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD Tahun 20xx disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

...

BAB IV Penutup

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan pencapaian target kinerja keuangan, termasuk perbandingan antara target dan realisasi dengan memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target

Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, baik dari faktor internal maupun eksternal pada Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1 Pendapatan LRA

- Menyajikan tabel LRA yang berisikan anggaran, realisasi, persentase realisasi, dan realisasi tahun sebelumnya;
- Tabel Pendapatan LRA disajikan dalam bentuk Kelompok sampai dengan Rincian Objek; dan
- Pendapatan Daerah dijelaskan pada level rekening Rincian Objek dan penjelasan atas tercapai/tidak tercapainya target.

3.1.2 Belanja Daerah:

- Menyajikan tabel LRA yang berisikan Anggaran, Realisasi, Persentase realisasi, dan Realisasi Tahun Sebelumnya;
- Tabel Belanja Daerah disajikan dalam bentuk Kelompok sampai dengan Rincian Objek; dan
- Belanja Daerah dijelaskan pada level rekening Rincian Objek dan berikut penjelasan atas tercapai/tidak tercapainya target.

3.2 LPSAL (khusus BLUD)

- Menyajikan informasi tentang perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari awal tahun hingga akhir tahun anggaran; dan
- LPSAL disusun **BLUD** sebagai bagian dari laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

3.3 Neraca

- Menyajikan uraian detail mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas;
- Menyajikan pos aset, kewajiban, dan ekuitas pada tabel perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- Menyajikan mutasi per objek atau rincian objek khususnya untuk akun piutang, penyisihan piutang, persediaan, aset tetap, aset lainnya, kewajiban, dan akun lain yang membutuhkan informasi mutasi beserta penjelasan secara rinci; dan
- Menyajikan rincian sewa pada pos Beban Dibayar Dimuka beserta penjelasan.

3.4 Laporan Operasional (LO);

3.4.1 Pendapatan LO:

- Menyajikan tabel Pendapatan-LO pada level kelompok, jenis dan rincian objek;
- Menjelaskan terkait kenaikan dan penurunan pada level rekening Rincian Objek; dan
- Menyajikan tabel dan penjelasan perbandingan LRA dan LO.

3.4.2 Beban:

- Menyajikan tabel Beban-LO pada level kelompok, jenis dan rincian objek;
- Menjelaskan terkait kenaikan dan penurunan pada level rekening Rincian Objek; dan
- Menyajikan tabel dan penjelasan perbandingan LRA dan LO.

3.5 Laporan Arus Kas (khusus BLUD)

Menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang mencerminkan kemampuan **BLUD** dalam mengelola keuangan untuk menjalankan fungsi pelayanannya, dengan rincian:

- Arus Kas dari Aktivitas Operasional
 - Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan layanan BLUD; dan
 - Pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasional.
- Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - Penerimaan kas dari penjualan aset tetap atau investasi jangka panjang; dan
 - Pengeluaran kas untuk pembelian aset tetap seperti peralatan, gedung, kendaraan, dan investasi lainnya untuk menunjang operasional BLUD.

- Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - Penerimaan kas dari penyertaan modal pemerintah daerah, pinjaman, atau dana hibah pembangunan; dan
 - Pengeluaran kas untuk pengembalian dana atau pelunasan pinjaman.

3.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan rincian mengenai perubahan ekuitas selama periode berkenaan, diantaranya:

- Nilai Ekuitas Awal, merupakan saldo ekuitas akhir tahun n-1 (audited);
- Surplus/Defisit-LO, merupakan surplus atas periode tahun berjalan;
- Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan, merupakan akun antara atau transitoris pada entitas akuntansi yang timbul karena proses transaksi selama periode akuntansi yang melibatkan RKUD untuk kemudian dikonsolidasikan pada kewajiban;
- Nilai Ekuitas Akhir, merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada Neraca.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan dan ringkasan dari masing-masing bab, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang serta harapan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan SKPD.

2.2 Ilustrasi Pos-Pos Laporan Keuangan

➤ Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Secara umum, target dalam APBD Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD Tahun 20xx tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Belanja			
	...			

Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran sebesar Rp...dan realisasi belanja sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran sebesar Rp...

No.	Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan-LO			
2	Beban - LO			
	...			

Tabel diatas menggambarkan Pendapatan - LO pada TA 20xx adalah sebesar Rp.... Sedangkan Beban - LO pada TA 20xx adalah sebesar Rp...

2.2 Hambatan dan Kendala

Secara umum, beberapa hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target Realisasi Kinerja Keuangan Belanja Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD Tahun 20xx yang kurang optimal antara lain:

1.
2.
3. ... dst

➤ Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3.1.1 Pendapatan Daerah – LRA

Anggaran TA 20xx (Rp)	Realisasi TA 20xx (Rp)	Realisasi TA 20xx-1 (Rp)
...

Pada tahun 20xx, anggaran pendapatan daerah Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD sebesar Rp... dengan realisasi sebesar Rp... atau terserap sebesar ...%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 20xx-1 realisasi pendapatan pada tahun 20xx mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...%.

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA mencapai sebesar Rp... lebih sebesar ...% dari anggaran sebesar Rp...

Rincian anggaran dan realisasi PAD Tahun 20xx adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah				
Lain-lain PAD yang Sah				
Jumlah				

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi Pendapatan Daerah melebihi/dibawah pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp... yang merupakan ...(alasan terjadinya pencapaian target yang melebihi atau tidak tercapai).

3.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 20xx adalah sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp... Realisasi pajak daerah pada tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...% jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, hal ini menunjukkan ... (alasan terjadinya pencapaian target yang melebihi atau tidak tercapai).

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 20xx adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
PBBP2				
BPHTB-Pemindahan Hak				
...				
Jumlah				

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi Pajak Daerah melebihi/dibawah pagu anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp... yang merupakan:

a. Penurunan pada penerimaan pajak ... di tahun 20xx disebabkan karena ... (alasan terjadinya pencapaian target yang melebihi atau tidak tercapai)

b. ...

3.1.1.1.2 ...

... dst

3.1.2 Belanja Daerah

Anggaran TA 20xx (Rp)	Realisasi TA 20xx (Rp)	Realisasi TA 20xx-1 (Rp)
...

Realisasi belanja daerah tahun 20xx sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...%.

3.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 20xx sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran belanja operasi sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, realisasi belanja operasi mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
...				
Jumlah				

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun 20xx sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
Belanja Gaji Pokok PNS				
Belanja Gaji Pokok PPPK				
...				
Jumlah				

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penyerapan belanja pegawai yang belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji Pokok PNS, penyerapan ...% karena ...

(penjelasan berdasarkan level Rincian Objek)

... dst

3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

... dst

3.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 20xx sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran belanja operasi sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, realisasi belanja modal mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
...				
Jumlah				

5.1.2.2.1 Belanja modal tanah

Realisasi belanja modal tanah tahun 20xx sebesar Rp... atau sebesar ...% dari anggaran belanja modal tanah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun 20xx-1, realisasi belanja modal tanah mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp... atau sebesar ...% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 20xx-1
Belanja Modal Tanah Persil				
Belanja Modal Tanah BLUD				
...				
Jumlah				

Berdasarkan tabel diatas, terdapat penyerapan belanja modal yang belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah BLUD, penyerapan ...% karena ...
(penjelasan berdasarkan level Rincian Objek)
... dst

5.1.2.2.2 Belanja modal peralatan dan mesin
... dst

LPSAL (Khusus BLUD)

LPSAL disusun berdasarkan hasil realisasi anggaran yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data penerimaan serta pengeluaran pembiayaan BLUD.

Komponen Utama LPSAL :

- Sisa Anggaran Lebih Awal

Tahun 20xx (Rp)	Tahun 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Penjelasan SAL yang dibawa dari tahun anggaran sebelumnya.

- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Tahun 20xx (Rp)	Tahun 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Penjelasan koreksi atau revisi atas saldo awal karena kesalahan atau perubahan kebijakan.

- SiLPA/(SiKPA)

Tahun 20xx (Rp)	Tahun 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Penjelasan Sisa Lebih/Defisit dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 20xx (Rp)	Tahun 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Penjelasan jika terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

- Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 20xx (Rp)	Tahun 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Penjelasan SAL yang tersedia pada akhir periode yang akan dibawa ke periode berikutnya.

Neraca

3.3.1 Aset Lancar

31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Aset lancar per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
Kas dan Setara Kas	_____	_____
Piutang		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah	_____	_____

3.3.1.1 Kas dan Setara Kas

31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
_____	_____
...	...

Nilai saldo kas dan setara kas per 31 Desember 20xx sebesar Rp... merupakan ... dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 20xx</u> (Rp)	<u>31 Desember 20xx-1</u> (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
...		
Jumlah

3.3.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20xx sebesar Rp0,00 (berikan penjelasan saat kas di bendahara penerimaan **tidak sama dengan nol**).

3.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 20xx sebesar Rp0,00 (berikan penjelasan saat kas di bendahara pengeluaran **tidak sama dengan nol**).

3.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... yang terdiri dari:

- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp... pada Bank ... dengan nomor rekening ...
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp... pada Bank ... dengan nomor rekening ...

... dst

3.3.1.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 20xx sebesar Rp... terdiri dari:

	<u>31 Desember 20xx</u>	<u>31 Desember 20xx-1</u>
Piutang Pajak	Rp	
...		
Jumlah Piutang	Rp	
Penyisihan Piutang	Rp	
Jumlah Piutang Bersih	Rp	

3.3.1.2.1 Piutang Pajak

Saldo piutang pajak per 31 Desember 20xx sebesar Rp... terdiri dari:

Piutang Pajak	Saldo Awal 20xx (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 20xx (Rp)
Pajak Penerangan Jalan				
PBB P2				
...				
Jumlah				

3.3.1.2.1.1 Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 20xx sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

Tahun SKP	Saldo Awal 20xx (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo Akhir 20xx (Rp)
...				
20xx-1				
20xx				
Jumlah				

(SKP : Surat Ketetapan Pajak)

Penambahan piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp... merupakan ... (berikan penjelasan). Sedangkan pelunasan piutang sebesar Rp... merupakan ... (berikan penjelasan).

3.3.1.2.1.2 ...dst

3.3.1.3 Penyisihan Piutang

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah umur piutang. Dari hasil perhitungan penyisihan piutang tahun 20xx, maka diperoleh nilai bersih penyisihan piutang untuk tahun 20xx sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Piutang	Saldo per 31 Desember 20xx Sebelum Penyisihan (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Saldo per 31 Desember 20xx-1 Setelah Penyisihan (Rp)
Piutang Pajak			
...			
Jumlah			

3.3.1.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp..., dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang/Penyisihan Piutang				Piutang Bruto	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
		< 1 thn (5%)	1 s/d 3 thn (10%)	> 3 thn s/d 5 thn (30%)	> 5 thn (100%)			
1	Pajak Reklame							
	...							
	Jumlah Piutang							
	Jumlah Penyisihan							

3.3.1.3.2 ...dst

3.3.1.4 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 20xx (Rp) <hr/> ...	31 Desember 20xx-1 (Rp) <hr/> ...
---	---

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 20xx sebesar Rp... dengan uraian sebagai berikut:

>> penjelasan rincian beban dibayar dimuka

3.3.1.5 Persediaan

31 Desember 20xx (Rp) <hr/> ...	31 Desember 20xx-1 (Rp) <hr/> ...
---	---

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Jombang per 31 Desember 20xx sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan	1 Januari 20xx (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
Alat Tulis Kantor				
Kertas Dan Cover				
..				
Jumlah				

Mutasi **tambah** persediaan xxx sebesar terdiri dari:

- Belanja barang dan jasa tahun 20xx sebesar Rp....
- Mutasi dari SKPD xxx sebesar Rp... sesuai dengan BAST No. ...
- Hibah dari xxx sebesar Rp... sesuai dengan BAST No. ...
- ...dst

Mutasi kurang persediaan xx sebesar terdiri dari:

- Penyisihan dan pemusnahan obat-obatan expired sebesar Rp...
- Mutasi ke SKPD xxx sebesar Rp sesuai dengan BAST No. ...
- Hibah ke xxx sebesar Rp ... sesuai dengan BAST No. ...
- ...dst

3.3.2 Aset Tetap

31 Desember 20xx	31 Desember 20xx-1
(Rp)	(Rp)
_____	_____
...	...

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 20xx sebesar Rp... dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tetap per 31 Desember 20xx-1	Rp	
Penambahan Tahun 20xx	Rp	
Jumlah	Rp	
Pengurangan Tahun 20xx	Rp	
Aset Tetap per 31 Desember 20xx-1	Rp	...

Jenis dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 20xx adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	31 Desember 20xx-1 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung dan Bangunan				
Jalan Irigasi dan Jaringan				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
Jumlah				

- Mutasi tambah Tanah/PM/GB/JIJ/ATL tahun 20xx sebesar Rp... terdiri dari: (jelaskan berdasarkan kelompok Aset Tetap)
 1. Penambahan yang dari belanja modal sebesar Rp...
 2. Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp...
 3. Reklasifikasi dari KIB xxx sebesar Rp...
 4. Mutasi dari SKPD xxx sebesar Rp... sesuai dengan BAST No. ...
 5. ...dst

- Mutasi kurang Tanah/PM/GB/JIJ/ATL tahun 20xx sebesar Rp... terdiri dari: (jelaskan berdasarkan kelompok Aset Tetap)
 1. Reklasifikasi ke Tanah/PM/GB/JIJ/ATL sebesar Rp...
 2. Reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp...
 3. Mutasi ke SKPD xxx sebesar Rp... sesuai dengan BAST No. ...
 4. Hibah ke xxx sebesar Rp... berupa ...
 5. ... dst

- Mutasi tambah KDP tahun 20xx sebesar Rp... merupakan penambahan dari reklasifikasi dari PM/GB/JIJ sebesar Rp... berupa ... yang belum selesai pekerjaannya tahun 20xx.

- Mutasi kurang KDP tahun 20xx sebesar Rp... merupakan penambahan dari reklasifikasi dari PM/GB/JIJ sebesar Rp... berupa ... yang telah selesai pekerjaannya tahun 20xx.

- Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan PM/GB/JIJ/ATL sebesar Rp... terdiri dari:
 1. Beban Penyusutan Tahun 20xx sebesar Rp...;
 2. Penyesuaian Akumulasi PM/GB/JIJ/ATL atas perolehan kapitalisasi aset sebesar Rp...
 3. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp...
 4. Mutasi dari SKPD xxx sebesar Rp...
 5. ... dst

- Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan PM/GB/JIJ/ATL sebesar Rp... terdiri dari:
 1. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp...
 2. Reklasifikasi Akumulasi dari PM/GB/JIJ/ATL ke PM/GB/JIJ/ATL sebesar Rp...
 3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp... karena pemindahatanganan
 4. Mutasi ke SKPD xxx sebesar Rp...
 5. ... dst

3.3.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 20xx sebesar Rp... terdiri dari:

Jenis Aset	31 Desember 20xx-1 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Aset Tak Berwujud				
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain lain				
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
Jumlah				

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Klaim	20xx-1 (Rp)	Penambahan (Rp)	Setoran (Rp)	20xx (Rp)
Dinas/Badan/Kecamatan					
CV. ABCD	BPK / 2007				
... dst					
Jumlah					

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp ... merupakan nilai buku dari ... dengan rincian sebagai berikut:

	<u>20xx</u>	<u>20xx – 1</u>
Software		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Jumlah

- Pada tahun 20xx terdapat penambahan sebesar Rp... yang merupakan ... (penjelasan mutasi tambah)
- Pada tahun 20xx terdapat pengurangan sebesar Rp... yang merupakan ... (penjelasan mutasi kurang)

Aset lain-lain per 31 Desember 20xx sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut:

	<u>20xx</u>	<u>20xx - 1</u>
Aset lain-lain		
Akumulasi Penyusutan		
Barang Rusak Berat		
Jumlah

Aset lain-lain sebesar Rp... merupakan .. sesuai dengan BAST Nomor ...

3.3.4 Kewajiban

Pada tahun 20xx jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp... dengan rincian:

	<u>20xx</u>	<u>20xx - 1</u>
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
... dst		
Jumlah

- Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp... merupakan kewajiban Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD... atas... (pejelasan rinci terhadap utang)
- Utang belanja sampai dengan 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... dengan rincian sebagai berikut :

Rekening	20xx-1 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	20xx-1 (Rp)
Utang Belanja Pegawai				
Utang Belanja Barang dan Jasa				
...dst				
Jumlah				

3.3.5 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas/Badan/Kecamatan/BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 20xx sebesar Rp... sedangkan per 31 Desember 20xx-1 sebesar Rp...

Laporan Operasional (LO)

3.4.1 Pendapatan – LO

<u>31 Desember 20xx</u> (Rp)	<u>31 Desember 20xx-1</u> (Rp)
...	...

Pendapatan-LO per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan LO tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO			
Jumlah			

3.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Pajak Daerah-LO			
Retribusi Daerah-LO			
...dst			
Jumlah			

3.4.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pajak daerah tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Pajak Reklame Kain			
Pajak Air Tanah			
...dst			
Jumlah			

Adapun rincian selisih pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pajak Reklame Kain			
Pajak Air Tanah			
...dst			
Jumlah			

Selisih antara Pendapatan pajak daerah-LRA dengan Pendapatan pajak daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang ... Tahun 20xx-1	Rp	
...dst	Rp	
Jumlah Penambahan (a)	Rp	<u> </u> ...
Pelunasan Piutang ... Tahun 20xx	Rp	
...dst	Rp	
Jumlah Pengurangan (b)	Rp	<u> </u> ...
Selisih (a-b)	Rp	<u> </u> ...

5.4.1.1.2 ...dst

5.4.1.2 ...dst

3.4.2 Beban

31 Desember 20xx	31 Desember 20xx-1
(Rp)	(Rp)
<u> </u>	<u> </u>
...	...

Beban-LO per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban-LO tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
...			
Jumlah			

3.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Beban Pegawai-LO tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Beban Gaji Pokok ASN			
Beban Tunjangan Keluarga ASN			
... dst			
Jumlah			

3.4.2.1.1. Beban Gaji Pokok ASN

Beban Gaji Pokok ASN per 31 Desember 20xx adalah sebesar Rp... Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Beban Gaji Pokok ASN tahun 20xx mengalami kenaikan/penurunan sebesar ...%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	20xx (Rp)	20xx-1 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Gaji dan Tunjangan ASN			
Tambahan Penghasilan ASN			
... dst			
Jumlah			

Adapun rincian selisih beban Gaji Pokok ASN -LO dengan belanja Gaji Pokok ASN - LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Gaji dan Tunjangan ASN			
Tambahan Penghasilan ASN			
...dst			
Jumlah			

Selisih antara Belanja pegawai– LRA dengan beban pegawai– LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelunasan Utang ...	Rp	
... dst		
Jumlah Penambahan (a)	Rp	_____
Penambahan Utang ...	Rp	
... dst	Rp	
Jumlah Pengurangan (b)	Rp	_____
Selisih (a-b)	Rp	_____

3.4.2.1.1 ... dst

3.4.2.2 ... dst

Laporan Arus Kas (khusus BLUD)

31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
...	...

3.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Pada Tahun 20xx, arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp... yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp... dengan arus kas keluar sebesar Rp... Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut

Uraian	20xx	20xx-1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah		
... dst		
Jumlah Arus Masuk/Keluar Kas Aktivitas Operasi		

3.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

... dst

Laporan Perubahan Ekuitas

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx-1 (Rp)
...	...

Saldo ekuitas awal Tahun 20xx sebesar Rp... merupakan saldo ekuitas akhir Tahun 20xxx-1 (audited)

3.6.2 Surplus/Defisit LO

31 Desember 20xx	31 Desember 20xx-1
(Rp)	(Rp)
...	...

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp... merupakan surplus periode Tahun 20xx berdasarkan nilai ekuitas pada Neraca.

3.6.3 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar

31 Desember 20xx	31 Desember 20xx-1
(Rp)	(Rp)
...	...

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar Rp... terdiri dari:

- Koreksi Nilai persediaan sebesar Rp... berasal dari ... terdiri dari:
 - Alat Tulis Kantor
 - ... dst
 - Jumlah** _____
...
- Koreksi Nilai piutang sebesar Rp. ... terdiri dari penyesuaian atas:
 - Lebih catat nilai piutang ...
 - Penyesuaian saldo awal piutang ...
 - ... dst
 - Jumlah** _____
...
- Lain-lain:
 - Akumulasi Penyusutan ...
 - Utang Belanja Barang dan Jasa ...
 - ... dst
 - Jumlah** _____
...

Berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 20xx, saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp... yang merupakan nilai ekuitas yang disajikan pada Neraca.

2.3 Panduan Jurnal dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

URAIAN	TANGGAL JURNAL	KODE REKENING	NAMA REKENING	D	K	JENIS JURNAL	DOKUMEN SUMBER	
A. JURNAL BALIK (Tahun 20xx -1)								
1. Persediaan	Setelah tanggal 1 Januari Tahun 20xx-1	8.1.2.x.x	Beban Persediaan	xxx		Jurnal Umum	Rincian Persediaan Tahun 20xx -1	
		1.1.x.x.x	Persediaan		xxx			
2. Beban listrik, air, telepon		2.1.6.x.x	Utang Beban Barang dan Jasa	xxx				<ul style="list-style-type: none"> Rincian Utang Belanja Tahun 20xx -1 Bukti bayar utang belanja Tahun 20xx
	8.1.2.x.x	Beban tagihan (listrik, air, telepon)		xxx				
B. PENYESUAIAN dan KOREKSI (Tahun 20xx)								
1. Piutang	31 Desember 20xx	1.1.x.x.x	Piutang	xxx		Jurnal Umum	Rincian mutasi piutang	
Pengakuan Piutang		7.1.x.x.x	Pendapatan-LO		xxx			
		3.1.x.x.x	Surplus/Defisit-LO	xxx				
Pengurangan Piutang		1.1.x.x.x	Piutang		xxx			
2. Penyisihan Piutang			Apabila piutang berkurang					Rincian penyisihan piutang
		1.1.5.x.x	Penyisihan Piutang	xxx				
		8.1.8.x.x	Beban Penyisihan Piutang		xxx			
			Apabila piutang bertambah					
		1.1.5.x.x	Penyisihan Piutang	xxx				
		3.1.x.x.x	Surplus/Defisit-LO		xxx			
3. Persediaan		1.1.x.x.x	Persediaan	xxx		Transaksi Non Anggaran	Rincian Persediaan Tahun 20xx	
		8.1.2.x.x	Beban Persediaan		xxx			

URAIAN	TANGGAL JURNAL	KODE REKENING	NAMA REKENING	D	K	JENIS JURNAL	DOKUMEN SUMBER
4. Beban Listrik, air, telepon	31 Desember 20xx	8.1.2.x.x	Beban jasa (listrik, air, telepon)	xxx		Jurnal Umum	Tagihan tahun 20xx
		2.1.6.x.x	Utang Beban Barang dan Jasa		xxx		
5. Jurnal penyesuaian Aset MUTASI TAMBAH Perolehan Lainnya Yang Sah		1.3.x.x.x	Aset Tetap...	xxx			
		7.3.1.x.x	Pendapatan-LO		xxx		
Kurang Catat		Tahun Berjalan					
		1.3.x.x.x	Aset Tetap ...	xxx			
		8.1.x.x.x	Beban.....		xxx		
		Tahun lalu					
		1.3.x.x.x	Aset Tetap...	xxx			
		3.1.x.x.x	Surplus/Defisit-LO		xxx		
Salah Beban (Kapitalisasi Aset Tetap)	Tahun Berjalan						
	1.3.x.x.x	Aset Tetap...	xxx				
	8.1.2.x.x	Beban.....		xxx			
	Tahun lalu						
	1.3.x.x.x	Aset Tetap...	xxx				
	3.1.x.x.x	Surplus/Defisit-LO		xxx			
Mutasi antar SKPD (SKPD penerima) Aset Tetap	Apabila nilai akumulasi = aset tetap						
	1.3.x.x.x	Aset Tetap	xxx				
	1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx			
						Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah disudah ditanda tangani Kepala Bidang Aset	

URAIAN	TANGGAL JURNAL	KODE REKENING	NAMA REKENING	D	K	JENIS JURNAL	DOKUMEN SUMBER
	31 Desember 20xx	1.3.x.x.x	Apabila nilai akumulasi kurang atau lebih dari aset tetap			Jurnal Umum	Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah disudah ditanda tangani Kepala Bidang Aset
		3.1.3.1.1	Aset Tetap	xxx			
		1.3.7.x.x	R/K PPKD Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx		
MUTASI KURANG			Apabila nilai akumulasi = aset tetap				
Penghapusan		1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx			
Penghapusan dari aset Tetap (berdasarkan SK)		1.3.x.x.x	Aset Tetap		xxx		
			Apabila nilai akumulasi kurang atau lebih dari aset tetap				
		8.3.x.x.x	Defisit.....	xxx			
		1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx			
		1.3.x.x.x	Aset Tetap		xxx		
Penghapusan Pindah ke Aset Lainnya		1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx			
		1.3.x.x.x	Aset Tetap		xxx		
	8.3.1.x.x	Defisit penghapusan Aset Tetap		xxx			
Inventarisasi							
Lebih Catat (Double)	3.1.x.x.x	Surplus/Defisit-LO	xxx				
	1.3.x.x.x	Aset Tetap...		xxx			
Salah Beban/Kebijakan							
Koreksi Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap (extra comptable)	8.1.x.x.x	Beban barang yang tidak dikapitalisasi	xxx				
	1.3.x.x.x	Aset Tetap		xxx			

URAIAN	TANGGAL JURNAL	KODE REKENING	NAMA REKENING	D	K	JENIS JURNAL	DOKUMEN SUMBER	
Mutasi Antar SKPD (SKPD pemberi)	31 Desember 20xx	1.3.7.x.x 1.3.x.x.x	Apabila nilai akumulasi = aset tetap			Jurnal Umum	Berita Acara Rekonsiliasi BMD yang sudah disudahi ditanda tangani Kepala Bidang Aset	
			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx				
		Apabila nilai akumulasi kurang atau lebih dari aset tetap			xxx			xxx
		3.1.3.1.1	R/K PPKD					
		1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap					
		1.3.x.x.x	Aset Tetap					
6. Penghapusan Barang RB dari Aset Lainnya	8.3.1.x.x	Defisit Penghapusan aset lainnya	xxx					
	1.3.7.x.x	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx					
	1.5.4.x.x	Aset Lainnya		xxx				
7. Reklasifikasi Dari Aset tetap ke Aset Tetap	1.3.x.x.x	Aset tetap	xxx					
	1.3.x.x.x	Aset Tetap		xxx				
Dari Aset Tetap Ke Software	1.5.3.5.1	Aset lainnya Software	xxx					
	1.3.x.x.x	Aset tetap		xxx				
Dasi Barang dan Jasa ke Aset Tetap	1.3.x.x.x	Aset Tetap	xxx					
	8.1.2.x.x	Beban Barang dan Jasa		xxx				
Dari Barang dan Jasa ke Software	1.5.3.x.x	Aset lainnya Software	xxx					
	8.1.2.x.x	Beban Barang dan Jasa		xxx				

URAIAN	TANGGAL JURNAL	KODE REKENING	NAMA REKENING	D	K	JENIS JURNAL	DOKUMEN SUMBER
8. Penyusutan Tahun 20xx-1	31 Desember 20xx	8.1.7.x.x	Beban penyusutan	xxx		Transaksi Non Anggaran (Input data Penyusutan/ Amortisasi Aset)	Laporan penyusutan dari bidang aset
		1.3.7.x.x	Akumulasi penyusutan		xxx		
9. Pendapatan diterima dimuka (bagi SKPD yang mempunyai pendapatan diterima dimuka)		8.1.2.x.x	Sewa LO	xxx		Jurnal Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Perjanjian Kerjasama • Kertas kerja
	2.1.5.x.x	Pendapatan diterima dimuka		xxx			
10. Pendapatan diterima dimuka yang Jatuh tempo dan menjadi pendapatan di Tahun 20xx (bagi SKPD yang mempunyai pendapatan diterima dimuka)	2.1.5.x.x	Pendapatan Diterima dimuka	xxx				
	8.1.2.x.x	Sewa - LO		xxx			

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan SKPD ini disusun sebagai acuan praktis bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan yang baik bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun koordinasi antar unit kerja. Oleh karena itu, panduan ini disusun untuk memberikan penjelasan yang sistematis mengenai prosedur, metode, serta prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Panduan ini juga mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan regulasi terkini yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, serta ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).